

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Unit Analisis, Populasi dan Sampel

1. Unit Analisis

Penelitian ini berfokus pada analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan unit analisis ini didasarkan pada adanya peristiwa khusus, yaitu peningkatan pendapatan pada tahun 2020 selama pandemi COVID-19, yang terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran pemerintah provinsi Jawa Tengah. Sementara provinsi lain mengalami penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lainnya Pendapatan Daerah yang Sah, Provinsi Jawa Tengah justru mengalami peningkatan pada dua pos pendapatan, yaitu Pendapatan Transfer dan Lainnya Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2020, terdapat 23 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang mencatat peningkatan pendapatan di pos PAD, meskipun pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai -2,65%.

2. Populasi

Populasi penelitian adalah kelompok atau wilayah yang menjadi fokus. Dalam penelitian ini, kita perlu memahami konsep dasar penelitian, yang menunjukkan elemen-elemen yang akan diselidiki (Sujarweni, 2015).

Dalam konteks analisis tingkat kemandirian daerah di Provinsi Jawa Tengah, populasi penelitian akan melibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari berbagai kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.1 Daftar Populasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 (Dalam milyar rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	PAD				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1	Kota Semarang	2.066,33	2.024,54	2.385,94	3.174,33	9.651,14
2	Kab. Banyumas	686,81	668,21	761,99	822,69	2.939,7
3	Kab. Cilacap	574,28	591,34	739,13	700,43	2.605,18
4	Kota Surakarta	546,02	492,78	560,58	647,44	2.246,82
5	Kab. Tegal	436,00	439,93	591,00	531,15	1.998,08
6	Kab. Sukoharjo	458,74	469,54	528,35	495,28	1.951,91
7	Kab. Semarang	429,01	442,53	575,75	480,30	1.927,59
8	Kab. Boyolali	395,43	451,54	514,97	444,69	1.806,63
9	Kab. Kebumen	409,16	403,03	472,02	512,35	1.796,56
10	Kab. Brebes	379,09	392,54	518,51	465,21	1.755,35
11	Kab. Karanganyar	387,76	384,68	426,65	511,74	1.710,83
12	Kab. Sragen	368,33	394,46	537,27	364,48	1.664,54
13	Kab. Kudus	343,82	383,89	507,17	418,71	1.653,59
14	Kab. Jepara	384,98	419,36	408,64	427,68	1.640,66
15	Kab. Kendal	350,50	356,75	439,20	447,52	1.593,97
16	Kab. Magelang	417,18	329,77	375,38	432,96	1.555,29
17	Kab. Demak	407,40	347,15	445,01	477,20	1.676,76
18	Kab. Grobogan	344,56	350,45	424,19	424,75	1.543,95
19	Kab. Pati	364,00	371,71	388,64	388,75	1.513,10
20	Kab. Pemasang	350,56	328,38	365,39	349,13	1.393,46
21	Kab. Rembang	308,45	326,67	404,10	353,09	1.392,31
22	Kab. Pekalongan	341,34	341,90	346,60	348,16	1.378,00
23	Kab. Purworejo	280,40	304,80	438,26	330,27	1.353,73
24	Kab. Klaten	311,65	329,96	315,30	357,97	1.314,88
25	Kab. Purbalingga	306,00	313,62	377,88	306,20	1.303,70
26	Kota Magelang	273,58	290,76	319,39	377,14	1.260,87
27	Kab. Temanggung	278,31	307,49	363,13	308,71	1.257,64
28	Kab. Blora	246,86	299,69	326,77	330,66	1.203,98
29	Kota Tegal	285,58	266,58	308,12	340,05	1.200,33
30	Kab. Wonogiri	287,22	274,29	241,30	332,75	1.135,56
31	Kab. Batang	245,84	257,42	322,79	300,97	1.127,02
32	Kab. Wonosobo	238,37	251,72	339,75	264,94	1.094,78
33	Kab. Banjarnegara	257,70	238,64	313,83	284,51	1.094,68
34	Kota Salatiga	236,09	219,54	280,68	241,00	977,31
35	Kota Pekalongan	212,78	229,87	252,04	263,48	958,17

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id Diolah penulis (2023)

3. Sampel

Sampel penelitian adalah sekelompok individu, unit analisis, atau entitas yang dipilih secara representatif dari populasi yang lebih besar (Sujarweni, 2015). Sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah 10 sampel dengan teknik *judgement sampling* yaitu tiga kab/kota dengan tingkat PAD tertinggi yaitu kota Semarang, kabupaten Banyumas dan kabupaten Cilacap, tiga kab/kota dengan tingkat PAD terendah yaitu kabupaten Banjarnegara, kota Salatiga dan kota Pekalongan dan empat kab/kota dengan tingkat PAD menengah yaitu kabupaten Magelang, kabupaten Demak, kabupaten Grobogan dan kabupaten Pati. Sehingga data berjumlah 40 hasil dari 10 kab/kota selama 4 tahun pengamatan.

Tabel 3.2 Daftar Sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 (Dalam Milyaran Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	PAD				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1	Kota Semarang	2.066,33	2.024,54	2.385,94	3.174,33	9.651,14
2	Kab. Banyumas	686,81	668,21	761,99	822,69	2.939,70
3	Kab. Cilacap	574,28	591,34	739,13	700,43	2.605,18
4	Kab. Magelang	417,18	329,77	375,38	432,96	1.555,29
5	Kab. Demak	407,40	347,15	445,01	477,20	1.676,76
6	Kab. Grobogan	344,56	350,45	424,19	424,75	1.543,95
7	Kab. Pati	364,00	371,71	388,64	388,75	1.513,10
8	Kab. Banjarnegara	257,70	238,64	313,83	284,51	1.094,68
9	Kota Salatiga	236,09	219,54	280,68	241,00	977,31
10	Kota Pekalongan	212,78	229,87	252,04	263,48	958,17

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id Diolah penulis (2023)

B. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia, seperti laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota yang dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

(DJPk) di www.djpk.kemenkeu.go.id, sedangkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat diunduh dari website resmi BPS di www.bps.go.id.

Beberapa jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2019-2022.
- 2) Data statistik pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dari Badan Pusat Statistik tahun 2019-2022.

Periode pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini dimulai dari tanggal 17 April 2023 s.d. 25 Mei 2023.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi adalah proses mengartikan variabel dengan jelas sehingga dapat diukur secara konkret. Dalam operasionalisasi variabel, konsep variabel yang diungkapkan dalam definisinya diubah menjadi istilah-istilah yang menunjukkan perilaku atau hal yang dapat diamati dan diuji oleh orang lain.. Hal ini mengacu pada penjelasan teoritis variabel yang akan diamati dan diukur Sugandi (2019). Dalam konteks penelitian analisis tingkat kemandirian daerah di Provinsi Jawa Tengah, ada beberapa variabel yang perlu dioperasionalisasikan untuk mendapatkan data yang dapat digunakan dalam analisis. Berikut adalah operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian:

1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Mahmudi (2019), Derajat Desentralisasi Fiskal atau Otonomi Fiskal daerah mengacu pada kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembangunan. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal diukur menggunakan rumus rasio berikut:

$$\text{Rasio DDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Variabel ini dipilih karena ingin menganalisis tingkat desentralisasi fiskal di daerah, yaitu sejauh mana pemerintah daerah memiliki otonomi dalam mengelola keuangan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal akan memberikan visualisasi tentang sejauh mana keuangan daerah dapat membiayai pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Berikut adalah kriteria pengukuran untuk Rasio Desentralisasi Fiskal menurut Mahmudi (2019):

Tabel 3.3. Kriteria Pengukuran Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Jenis Rasio	Kriteria	
	Derajat Desentralisasi (%)	Kemandirian
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	0-10	Sangat Kurang
	11-20	Kurang
	21-30	Sedang
	31-40	Cukup
	41-50	Baik
	50 >	Sangat Baik

Sumber: Mahmudi, (2019)

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Daerah mengindikasikan sejauh mana suatu daerah memiliki kemampuan untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan menggunakan pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi yang dikelola oleh daerah itu sendiri. Rumus dari rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut, sesuai dengan Mahmudi (2019):

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Pemilihan variabel ini dipertimbangkan karena rasio ini dianggap sebagai indikator yang paling akurat untuk mengukur tingkat kemandirian daerah; jika hasil rasio ini tinggi, maka tingkat kemandirian daerahnya juga tinggi. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memberikan petunjuk tentang kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber asli daerah dan mengurangi ketergantungan pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Berikut adalah kriteria pengukuran untuk Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2019):

Tabel 3.4. Kriteria Pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Jenis Rasio	Kriteria		
	Rasio Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	0 - 25	Rendah Sekali	Instruktif
	26 - 50	Rendah	Konsultatif
	51 - 75	Cukup	Partisipatif
	76 - 100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Mahmudi, (2019)

3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa untuk mengukur rasio ketergantungan keuangan daerah, kita dapat membandingkan jumlah pendapatan yang diterima dalam bentuk transfer oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan keseluruhan pemerintah daerah tersebut. Semakin tinggi angka rasio ini, maka berbanding lurus dengan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Rumus dari rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Alasan pemilihan variabel ini adalah untuk mengevaluasi tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada transfer keuangan dari pusat. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah akan memberikan informasi mengenai sejauh mana daerah bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, yang dapat memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Berikut adalah kriteria pengukuran untuk Rasio Ketergantungan Daerah menurut Mahmudi (2019):

Tabel 3.5. Kriteria Pengukuran Rasio Ketergantungan Daerah

Jenis Rasio	Kriteria	
	Rasio Ketergantungan (%)	Tingkat Ketergantungan
Rasio Ketergantungan Daerah	0 - 10	Sangat Rendah
	11 - 20	Rendah
	21 - 30	Sedang
	31 - 40	Cukup
	41 - 50	Tinggi
	> 50	Sangat Tinggi

Sumber: Mahmudi, (2019)

D. Teknik Analisis

Teknik analisis data merujuk pada metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk memproses data dengan tujuan menghasilkan informasi yang lebih terperinci dan berguna, sehingga karakteristik data tersebut menjadi lebih jelas dan membantu dalam mengidentifikasi solusi untuk masalah yang ada, terutama dalam konteks penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan analisis tren untuk menganalisis sejumlah sampel laporan keuangan dari kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga tahun 2022.

Berikut adalah langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam proses analisis penelitian ini:

- 1) Pengumpulan data yang diperlukan, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten & Kota Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2019-2022, dari website resmi.
- 2) Perhitungan data dalam bentuk Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Daerah, dan Rasio Ketergantungan Daerah. Proses operasionalisasi variabel (Proksi Pengukuran) sebagai berikut:

Tabel 3.6. Rasio Keuangan yang Digunakan Pada Penelitian

Jenis Rasio	Rumus
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$
Rasio Ketergantungan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

Sumber: Mahmudi, (2019)

- 3) Lakukan analisis *trend*:
 - a) Langkah pertama dalam pembuatan indeks adalah menetapkan tahun dasar sebagai referensi dengan nilai indeks 100, yang diambil dari tahun perubahan atau tahun lainnya yang relevan.
 - b) Selanjutnya, untuk menghitung angka indeks untuk tahun-tahun lainnya, digunakan angka pos pada laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut.
 - c) Kemudian, dapat dilakukan perkiraan kecenderungan yang mungkin terjadi berdasarkan pola historis dari pos-pos laporan keuangan yang sedang dianalisis.
- 4) Melakukan analisis dan merumuskan kesimpulan terkait tingkat kemandirian daerah pada kabupaten & kota di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2019-2022.

